

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga terdapat beberapa aspek sudah sesuai dengan indikator efektivitas kebijakan. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian pada beberapa aspek efektivitas kebijakan yang belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, kebijakan kota layak anak klaster perlindungan khusus masih memerlukan pengembangan dan perbaikan lebih lanjut agar dapat memberikan perlindungan yang ideal bagi anak-anak di Kota Salatiga.

1. Tepat kebijakan terlihat dari mekanisme penanganan kasus yang jelas dengan SOP respons cepat, namun masih memiliki kelemahan struktural. Tepat pelaksanaan ditandai koordinasi baik antarinstansi melalui komunikasi telepon dan WhatsApp, tetapi terkendala keterbatasan tenaga profesional dan minimnya integrasi sistem. Tepat target mencapai 100% anak terlayani melalui asesmen komprehensif dan program spesifik seperti 2P, namun sistem masih memerlukan penyempurnaan. Tepat lingkungan menghadapi tantangan dengan rendahnya keterlibatan masyarakat, minimnya platform pengaduan, dan kemitraan LSM yang terbatas. Tepat proses menampilkan kemajuan melalui pelatihan penyedia layanan, alokasi anggaran, dan upaya peningkatan literasi, namun masih membutuhkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas ramah anak.
2. Efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga dihadapkan pada dua faktor utama penghambat. Pertama, keterbatasan sumber daya yang mencakup kurangnya tenaga

profesional internal, minimnya fasilitas ramah anak, dan rendahnya pemanfaatan infrastruktur yang telah disediakan. Kedua, struktur birokrasi yang kurang efektif, ditandai dengan minimnya integrasi layanan antarinstansi dan proses pengambilan keputusan yang lambat, terutama di tingkat sekolah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan realita di lapangan, peneliti memberikan saran terkait efektivitas pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki beberapa dimensi yang belum maksimal:

1. DP3APPKB perlu mentransformasi tim P2TP2A menjadi UPTD, mengembangkan sistem manajemen kasus berbasis data, dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pemantauan kasus sambil memperluas jaringan mitra terkhusus pembentukan LSM yang menaungi perlindungan anak
2. Dinas Pendidikan harus melatih guru dalam penanganan kasus kekerasan anak, membuat mekanisme pelaporan cepat, dan menggunakan platform digital untuk komunikasi efektif.
3. Tenaga pendidik perlu berkolaborasi dengan psikolog membentuk tim penanganan kasus, serta pelatihan mengenali tanda-tanda kekerasan dan trauma pada anak.
4. Masyarakat harus dilibatkan melalui kampanye kreatif di media sosial dan penyebaran informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan *influencer* lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
5. Perlu ada inovasi aplikasi yang memungkinkan anak-anak untuk melaporkan masalah secara anonim.